

# **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SAMARINDA (STUDI PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SAMARINDA)**

**Euis Hasmita Putri <sup>1</sup>**

## ***ABSTRAK***

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kota Samarinda pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda dan untuk mengidentifikasi factor penghambatnya. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, pengawasan dan faktor penghambat pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kota Samarinda pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas *key informan* yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Kepala Seksi Pengembangan Usaha UKM, Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan UKM dan Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan UKM sedangkan *informan* yakni para pelaku UMKM yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya seperti Pengrajin Lukisan Pasir Dalam Botol, Pengusaha Opak Gambir Tornado Camilan Khas Tradisional dari Jawa Timur dan Pengrajin Manik dan Pernak-pernik Khas Kalimantan Timur. Dinas Koperasidan UMKM Kota Samarinda melalui metode purposive sampling. Data yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan kepada para pelaku UMKM. Untuk factor penghambatnya yakni, minimnya dana atau biaya sehingga membatasi pengadaan kegiatan pelatihan, Sumber Daya Manusia yang belum memadai dalam melakukan kegiatan UMK, kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas, dan pemasaran yang relatif sulit.

***Kata Kunci :Efektevitas, Pelaksanaan Program, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).***

## **PENDAHULUAN**

Pengertian Usaha Mikro berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.euis.hasmita@yahoo.com

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang di miliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha yang ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki, di kuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil ataupun Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Usaha Mikro merupakan kegiatan yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.

Pemerintah kota Samarinda berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai kesempatan berusaha di bidang UMKM. Namun usaha tersebut terkendala dari pihak UMKM itu sendiri, adapun serangkaian masalah yang dihadapi oleh UMKM, seperti :

1. Modal terbatas

Keterbatasan modal terutama di sebabkan oleh keterbatasan akses langsung terhadap berbagai informasi, layanan dan fasilitas keuangan yang di sediakan oleh lembaga keuangan formal maupun non formal.

2. Kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas

Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan usaha sulit di temukan, antara lain karena pengetahuan dan manajerial skill pengusaha kecil dan menengah belum mampu menyusun strategi bisnis yang tepat. Kemampuan usaha dalam mengorganisasikan diri dan karyawan masih lemah, sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas dan seringkali pengusaha harus bertindak "*one men show*"

3. Pemasaran yang relatif sulit

Di harapkan pada struktur pasar yang sangat kompetitif. Bukan saja antara industri kecil melainkan ada kalanya juga dengan industri besar. Disamping itu, kesulitan pemasaran juga disebabkan oleh berbagai faktor pendukung utama seperti informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada di dalam maupun di luar negeri.

4. Permasalahan sumber daya manusia yang rendah

Belum memadainya sumber daya manusia yang mampu menciptakan peluang sendiri untuk memulai sebuah usaha. Sehingga bisa di katakan masih sangat lemah sumber daya manusia yang ada saat ini, Sulistyastuti (2004) dalam Utama (2013).

UMKM juga masih menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan iklim usaha seperti: (a) besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan; dan (b) praktik usaha yang tidak sehat. Selain itu, otonomi daerah yang di harapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata.

Melihat kendala-kendala di atas, maka Dinas Koperasi Kota Samarinda perlu melakukan pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi Kota Samarinda adalah unsur pelaksanaan Pemerintah kota yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengkoperasian pengusaha kecil dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan demikian pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah sudah menjadi tugas pokok dalam program kerja dinas koperasi. Program pengembangan UMKM itu meliputi kegiatan pelatihan, pembinaan, pemberdayaan, sosialisasi dan pengawasan.

### **KERANGKA DASAR TEORI**

Teori merupakan pedoman, landasan dan pegangan bagi penulis dalam menentukan langkah-langkah pemecahan suatu masalah yang dapat digunakan sebagai jalan keluar untuk mengatasi suatu permasalahan yang ingin di bahas.

Pada bab ini penulis akan memaparkan kerangka dasar yang akan di jadikan sbagai landasan atau acuan dalam penyusunan laporan skripsi ini, yang penulis kutip konsep-konsep dasar teori para ahli dan hasil karya ilmiah berupa buku-buku literatur sebagai penunjang referensi yang sangat membantu dalam penyusunan laporan skripsi. Penulis menerangkan pengertian, definisi dan arti dari beberapa variabel dan *grand theory* yaitu, organisasi dan manajemen, efektivitas, kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pengembangan UMKM.

#### **Organisasi dan Manajemen**

Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang di desain untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Presthus (Etzioni,1964:1) "*our society is an organizational society*". Selanjutnya Etzioni (1964) menyatakan bahwa kita semua dilahirkan dalam organisasi, di didik oleh organisasi, dan hampir semua di antara kita menghabiskan hidup kita bekerja untuk organisasi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa organisasi adalah entitas sosial yang di koordinasikan secara sadar dengan batasan yang dapat di identifikasikan dan bekerja terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi di koordinasikan secara sadar mengandung arti manajemen dan organisasi yang merupakan entitas (kesatuan) sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang saling berinteraksi. Seperti yang di kemukakan oleh

Trecker (Sutarto, 1984: 24) bahwa organisasi adalah perbuatan atau proses yang menghimpun atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berhubungan dari bagian menjadi suatu keseluruhan yang bekerja. Mandra (199: 57) berpendapat bahwa organisasi adalah suatu system hubungan kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan. Organisasi harus memiliki: (1) sejumlah orang, (2) tujuan bersama, (3) interaksi yang selalu dapat diukur atau di terangkan menurut suatu struktur tertentu, (4) setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan pribadi, dan (5) interaksi selalu di arahkan untuk mencapai tujuan bersama. Dapat di artikan bahwa organisasi adalah suatu proses interaksi dari seseorang yang mengikuti suatu struktur tertentu dalam mencapai tujuan pribadi dan bersama. Menurut Thoha (2002: 29) manusia adalah salah satu dimensi dalam organisasi yang amat penting, merupakan salah satu faktor dan pendukung organisasi. Berikut karakteristik organisasi menurut Thoha (2002) : Hirarki, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem *reward*, sistem *control*.

Menurut Etzioni (1969: 155) "*organizations are social units oriented toward the pursuit of specific goal*". Gross (Liliweri, 1997), berpendapat bahwa konsep utama studi tentang organisasi adalah tujuan organisasi. Tujuan organisasi dapat digambarkan sebagai sebuah cita dan harapanyang menyeluruh yang juga menjadi pusat perhatian sehingga seluruh potensi organisasi (pikiran/gagasan, sikap, dan tindakan/aktivitas) diarahkan untuk mencapainya.

Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*procces oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik. Sejalan dengan pendapat Terry (1958) dalam Torang (2014: 165) yang menjelaskan bahwa "*manajemen is the accomplishing of a predetermined objectives trough the efforts of other people*"

Organisasi merupakan wadah terhadap proses administrasi untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuannya, organisasi membutuhkan manajemen untuk meng-*energize* proses agar '*output*' and '*outcome*' yang di inginkan dapat tercapai.

Eksistensi manajemen dalam organisasi menjadi sangat penting, karena tanpa manajemen tidak akan ada tujuan organisasi yang akan di capai. Untuk mencapai tujuan organisasi, tentu sangat di tentukan oleh kompetisi individu yang mengendalikan manajemen atau di sebut sebagai manajer.

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain suatu aktifitas disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan suatu organisasi secara umum diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi

dengan kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara obyektif.

Efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Menurut Rivanto dalam Masruri (2014), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Wijaya (1993:32) mengemukakan, Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Selanjutnya Sarwoto (1990: 126) mengistilahkan Efektivitas dengan “Berhasil Guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian organisasi. Hal ini di pertegas Siagian (1996: 19) yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang di tentukan, artinya apabila pelaksanaan tugas di nilai baik atau tidak adalah sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut di selesaikan dan bukan terutama menjawab tentang bagaimana melaksanakan serta berapa biaya yang di keluarkan untuk pekerjaan tersebut.

Aspek – aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010 : 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek – aspek antara lain : (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat diliat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya; (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan dan kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Gibson (1984: 38) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas yaitu : (1) Pendekatan Tujuan, untuk mendefinisikan dan mengevaluasi ekefektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya. Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem; (2) Pendekatan Teori Sistem, menekankan

pada pertahanan elemen dasar melakukan-proses-pengeluaran dan beradaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang bisa menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditunjukkan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang , kelompok atau organisasi; (3) Pendekatan *Multiple Constituency*, pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi.

### **Kewirausahaan**

Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercrepta, berkarsa, dan bersahaja berusaha dalam rangka menciptakan peluang dan meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Pengertian kewirausahaan secara umum adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda (inovativ) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kewirausahaan juga merupakan kemampuan seseorang dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik itu materil, intelektual, waktu dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berfikir kreatif dan bertindak inovativ untuk menciptakan peluang. Kewirausahaan juga bisa dikatakan sebagai proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung, fisik, resiko sosial, dan akan menerima *reward* berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal.

Kewirausahaan adalah semangat, prilaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/ masyarakat dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi serta kemampuan manajemen (Salim Siagian, 1988). Kewirausahaan mencakup kegiatan yang di butuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum di ketahui sepenuhnya, Harvey Leibenstein dalam (Wagiono 1999).

Kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan, Penrose dalam (Suryana 2001). Kewirausahaan adalah proses

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (Peter F. Drucker, 1959).

Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha (Prawiro, 1997:46). Kewirausahaan adalah segala sesuatu yang penting mengenai seseorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat berkerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan mengambil segala resiko untuk mewujudkan gagasannya (Sudomo, 1989:44). Dalam Suryana 2001.

Kewirausahaan menyangkut tiga dimensi penting : yakni inovatif, pengambilan resiko dan proaktif.

Inovatif, keinovatifan mengacu pada pengembangan produk, jasa atau proses yang unik. Ia meliputi upaya sadar untuk menciptakan tujuan tertentu, memfokuskan perubahan pada potensi sosial ekonomi perusahaan yang berdasarkan pada kreativitas dan intuisi individu (Wagiono 1999). Mengingat orang yang kreatif dan intuitif dikenal menyukai lingkungan kerja yang memberikan independensi dan otonomi yang tinggi.

Pengambilan Resiko, sementara itu jiwa kewirausahaan juga berkaitan dengan pengambilan resiko, yang mengacu pada kemauan aktif untuk mengejar peluang. Resiko perlu di perhitungkan dan wirausaha secara objektif harus mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan sumber daya yang ada serta secara sistematis mengelola faktor-faktor ini.

Proaktif, Miller 1987 dalam (Wagiono 1999) melihatnya sebagai sifat assertif, sementara Minzberg melihat bahwa kewirausahaan sebagai pengambil resiko dan melakukannya, ketimbang sekedar bereaksi terhadap lingkungannya. Baternan dan Grant (1993) memperkenalkan istilah perilaku proaktif yang mengidentifikasikan perbedaan antara orang-orang yang bertindak guna mempengaruhi lingkungannya. Sementara Venkatraman menggunakan istilah orientasi strategis yang mengacu kepada pencarian peluang pasar yang terus menerus dan bereksperimen untuk merubah *trend* lingkungannya (Rambat Lupiyoadi, 1999) dalam (Wagiono 1999).

Menurut Sasetyowati (2013), keberadaan UMKM harus tetap dipertahankan dan dikembangkan agar dapat terus berperan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat perdesaan, yang diperjelas oleh Kuncoro (2007) yang mengatakan bahwa usaha kecil akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah angka kerja Indonesia, tetapi juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa usaha kecil di Indonesia memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan dan memperlancar perekonomian negara.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih memegang peranan penting dalam menampung angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda yang masih belum berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM masih cukup dominan menyerap angkatan kerja

dikota maupun perdesaan, tapi disisi lain menunjukkan gejala produktivitas yang rendah karena masih menggunakan alat-alat tradisional dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta penggunaan teknologi yang sederhana, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan dihasilkan. Dengan kondisi seperti ini, tentunya pendapatan yang dihasilkan tidak akan maksimal. Tetapi kenyataannya UMKM dapat menopang perekonomian nasional dengan segala kekurangan dukungan dari pemerintah (Ramadhan, 2012).

Definisi UMKM sendiri masih terdapat banyak versi. Beberapa lembaga dan para peneliti telah mendefinisikan UMKM dengan pengertian yang berbeda. Namun, kita tetap harus sadar bahwa salah satu ciri UMKM memang bentuknya beragam, yang penting perbedaan tersebut masih dapat ditelusuri konsistensinya. Pada tahun 2002, dari sekitar 40 juta pelaku usaha, 39 juta diantaranya usaha mikro, 640 ribu unit usaha kecil, 70 ribu usaha menengah dan 11 ribu usaha besar (krisnamurti, 2007).

Sulistiyastuti (2004) dalam Utama (2013) menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. (1) UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. (2) tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. (3) sebagian besar berlokasi di perdesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. (4) UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Menurut Utama (2013), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil – hasil pembangunan.

UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumberdaya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum.

Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaannya mendominasi lebih dari 99% dalam struktur perekonomian nasional. Jika dicermati lebih mendalam keberadaan UMKM cukup dilematis. Di satu sisi keberadaannya dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di masa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan harapan masyarakat. Karena keberadaannya mampu menyediakan banyak kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi, serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah.

Di sisi lain, keberadaannya juga masih banyak menghadapi kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, keberadaan UMKM lebih banyak menghadapi berbagai keterbatasan, seperti modal, teknik produksi, pangsa pasar, manajemen dan teknologi, serta lemah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan serta rendahnya daya saing. Sedangkan, secara eksternal lebih banyak menghadapi masalah, seperti persoalan

perijinan, bahan baku, lokasi pemasaran, sulitnya memperoleh kredit bank, iklim usaha yang kurang kondusif, kepedulian masyarakat, dan kurang pembinaan (Prasetyo, 2008).

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Fokus perekonomian Indonesia sebelum terjadinya krisis lebih di titik beratkan pada usaha besar dan terbukti telah menyeret perekonomian ke dalam krisis yang semakin dalam. Demikian pula pada saat Indonesia mengalami puncak krisis pada tahun 1997, ternyata yang menyelamatkan perekonomian adalah unit-unit usaha mikro, kecil dan menengah.

### **Pengembangan UMKM**

Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, seperti berikut :

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif  
Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain mengusahakan kententraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
2. Bantuan Permodalan Pemerintah  
Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan modal ventura. Pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga keuangan mikro bank antara lain, BRI unit desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai saat ini BRI memiliki sekitar 4.000 unit tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit melayani UMKM. Untuk itu perlu mendorong perkembangan LKM, yang harus dilakukan saat ini adalah mendorong bagaimana pengembangan LKM ini berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.
3. Perlindungan Usaha Jenis-jenis Usaha tertentu  
Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara pada saling menguntungkan (*win-win solution*)
4. Pengembangan Kemitraan  
Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antar UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar baik didalam negeri maupun luar negeri, menghindarkan terjadinya monopoli

dalam usaha. Disamping itu juga memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan Pemerintah

Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usaha. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk Lembaga Khusus

Membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

### **Pembinaan**

Pembinaan sebagai mana yang di maksudkan dalam undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang pengkoprasian dalam pasal 60, pasal 61 dan pasal 62 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional. Serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yaitu :

1. Menciptakan dan mengembangkan kondisi yang mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Samarinda :
  - a. memberikan kesempatan yang seluasnya-luasnya kepada para pelaku UMKM
  - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan para pelaku UMKM agar menjadi UMKM yang sehat, tangguh dan mandiri.
  - c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antar para pelaku UMKM
2. Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada UMKM yang ada di Kota Samarinda indikatornya adalah :
  - a. Membimbing pelaku UMKM yang sesuai dengan bidang masing-masing usahanya.
  - b. Mengembangkan dan membantu pelaksanaan penyuluhan, dan pelatihan UMKM
  - c. Mengembangkan bidang usaha dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Thoha (2001: 7). Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, di awali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan

tersebut yang di sertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. Widjaja (1998: 14).

Dari definisi di atas yang di maksud pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik

Pembinaan merupakan salah satu indikator fokus penelitian penulis. Pembinaan di sini yaitu kegiatan yang telah di lakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda kepada para pelaku UMKM seperti melatih, memotivasi, meningkatkan kemampuan yang sudah ada, dan kegiatan membimbing para pelaku UMKM agar lebih paham dan bisa mengembangkan usaha yang di geluti. Dengan adanya pembinaan yang efektif maka para pelaku UMKM bisa lebih maju dalam usahanya.

### **Pengawasan**

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah di tetapkan dapat tercapai efektif dan efisien. Menurut Scherborn dalam Ernie dan Saefullah (2005: 317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan ukuran yang telah di tetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standart untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat di jadikan umpan balik pembagian hasil yang di komunikasikan ke para karyawan.

Menurut Harahap (2001: 14), pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat di gunakan oleh seseorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang di lakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004: 61), pengawasan adalah proses di mana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang di lakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah di tentukan. Selain itu menurut Dessler (2009: 2), menyatakan bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan penyusunan standart seperti kuota penjualan, standart kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual di bandingkan standar yang telah di tetapkan; mengadakan tindakan korektif yang di perlukan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah di susun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan di katakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karna itu manusia dalam organisasi perlu di awasi, bukan mencari kesalahannya

kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut Husnaini (2001: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan, melakukan tindakan koreksi terhadap tindakan yang di lakukan dalam pencapaian kerja yang baik

Pengawasan merupakan salah satu indikator fokus penelitian penulis. Pengawasan di sini yaitu kegiatan yang telah di lakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda kepada para pelaku UMKM seperti member bantuan lalu mengawasi agar apa yang telah di berikan berguna sebagai mana mestinya dan kegiatan membimbing para pelaku UMKM agar lebih paham dan bisa mengembangkan usaha yang di geluti. Dengan adanya pengawasan yang efektif maka para pelaku UMKM bisa lebih maju dan berkembang dalam usahanya.

### **Definisi Konsepsional**

Definisi Konsepsional merupakan pembahasan pengertian suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Berdasarkan pada uraian teori konsep, maka konsep dalam penelitian yaitu :

Efektivitas pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kota Samarinda adalah suatu kegiatan dalam rangka memberikan latihan dan bimbingan kepada para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru melalui pelatihan, pembinaan, pemberdayaan, sosialisasi, dan pengawasan menurut Prasetyo (2008) , agar dapat berhasil guna dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas
  - a. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda sebagai tempat pelatihan. Hingga saat ini pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda sudah berjalan cukup maksimal
  - b. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda melalui pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Kota samarinda masih dalam proses menuju maksimal dan dari Dinas pun akan selalu mengupayakan agar program pemberdayaan yang dilakukan mencapai 100% pengerjaannya dalam artian belum maksimal.
  - c. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda melalui pembinaan yang telah di jalankan hingga saat ini tentunya sudah berjalan baik dan maksimal.

Dengan mengadakan pembinaan-pembinaan seperti kursus, pameran dan seminar secara rutin Dinas Koperasi telah membina para pelaku UMKM yang ada di Kota Samarinda untuk lebih maju dan berkembang dalam menjalankan usaha. Dengan pembinaan yang maksimal tentunya juga dapat menghasilkan para pelaku UMKM yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga bisa bersaing di pasar dalam maupun luar negeri.

- d. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda melalui sosialisasi yang telah dilakukan juga telah berjalan dengan baik, contoh dari sosialisasi seperti seminar kewirausahaan dan pameran yang telah di adakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda sangat berguna bagi para pelaku UMKM karena dengan sosialisasi seperti inilah efektifitas pelaksanaan program pengembangan di Kota Samarinda bisa terwujud melalui keberhasilan para pelaku UMKM yang telah di bina untuk mengikuti sosialisasi yang di adakan. Se jauh ini minat pelaku UMKM sangat positif dan semangat sekali dalam mengikuti berbagai sosialisasi yang di adakan.
  - e. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda melalui pengawasan sudah cukup baik namun masih kurang maksimal, masih banyak keluhan para pelaku UMKM kepada Dinas karena tidak ada jadwal berkunjung tiba-tiba datang tanpa memberi kabar sebelumnya. Akan tetapi sejauh ini upaya pengawasan yang telah Dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda telah cukup maksimal dalam pemberian fasilitas peralatan yang di butuhkan oleh para pelaku UMKM.
2. Faktor Penghambat

a. Dana Anggaran atau Biaya (Modal terbatas)

Defisit Anggaran yang memberikan dampak kurang efektifnya seluruh program-program seperti pelatihan hingga pengawasan. Faktor biaya dan anggaran tentunya sangat berperan di sini, karena jika tidak ada anggaran yang masuk dari pusat maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda tentunya tidak bisa menjalankan program-programnya secara maksimal. Berhubung segala kegiatan yang dijalankan pasti memerlukan Dana yang tidak sedikit. Maka dari itu butuh kondisi keuangan yang stabil dari pihak pemerintah agar segala kegiatan pelatihan, pengembangan, pemberdayaan, sosialisasi dan pengawasan berjalan baik dan sebagai mana mestinya

b. Sumber Daya Manusia

Di karenakan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas kepada para pelaku UMKM, masih belum di bentuknya jadwal yang teratur untuk pengawasan yang di lakukan dan juga minimnya tenaga kerja atau pegawai yang langsung terjun ke lapangan untuk mengawasi para pelaku UMKM di Kota Samarinda. Tidak hanya sumber daya manusia dari pihak Dinas akan tetapi sumber daya manusia dari para pelaku UMKM juga masih belum banyak yang paham dan mengerti bagaimana tata cara membuka usaha yang baik, sehingga masih ada

saja para pelaku usaha yang tidak mengurus surat izin berdiri usaha dan seringkali masih banyak di temukan UMKM yang berdiri tanpa izin dan tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda.

c. Kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas

Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan usaha sulit di temukan, antara lain karena pengetahuan dan manajerial skill pengusaha kecil dan menengah belum mampu menyusun strategi bisnis yang tepat. Kemampuan usaha dalam mengorganisasikan diri dan karyawan masih lemah, sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas dan seringkali pengusaha harus bertindak “one men show”

d. Pemasaran yang relatif sulit

Di harapkan pada struktur pasar yang sangat kompetitif. Bukan saja antara industri kecil melainkan ada kalanya juga dengan industri besar. Disamping itu, kesulitan pemasaran juga disebabkan oleh berbagai faktor pendukung utama seperti informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada di dalam maupun di luar negeri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alma, Buchari. 2009. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung.
- Nitisusanto, Mulyadi. 2010. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung.
- Armstrong, Michael and Angela Baron. 1998. *Performance Management*. London: Institute of Personnel and Development.
- Bryan, Coralie dan White, Louise G., 1989. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. LP3S. Jakarta.
- Clapham, Ronald, 1991. *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*. Penerjemah Masri Maris. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta.
- Dessler, Gary dan Agus Dharma. 2009. *Manajemen Personalia*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga
- Etzioni, Amitai. 1964. *Modern Organization*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Eva, Agustine, 2007. *Presepsi Penggunaan Aplikasi Internet Untuk Pemasaran Produk Usaha Kecil Menengah*. Seminar nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007, ISSN: 1907-5022
- Gibson, James L. et al. 1984. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Di terjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binapura Aksara.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Hafsah, M. J. 2004. *Upaya Pengembangan Usaha kecil dan Menengah (UKM)*. Infokop No. 25 Tahun XX.
- Harahap, Sofyan Sari. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta: PT Pustaka Quantum.
- Harvey, Leibenstein, “*Entrepreneurship*” in Gerald M. Meier, *Leading Issues in Economic Development*, Second Edition, Oxford University Press, 1971.

- Husein, Umar. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Husnaini. 2001. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pengembangan yang Berdasar pada Masyarakat*. Yogyakarta UGM.
- Krisnamurti, Bayu. 2007. *Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*.

**Dokumen-dokumen :**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. *Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
- Profil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015. *Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah*
- Peraturan walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2014. *Tentang Pendelagasian Kewenangan Walikota kepada Camat tentang Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah*